

ABSTRAK

Prostitusi di Indonesia masih menjadi isu yang kontroversial, baik dari segi hukum, sosial, maupun moral. Dalam konteks ini, relasi antara germo (patron) dan pekerja seks komersial (PSK) memiliki dinamika yang kompleks, di mana hubungan patron-klien berperan penting dalam struktur prostitusi yang ada. Dalam banyak kasus, PSK sering kali berada dalam posisi yang terjebak dalam ketergantungan ekonomi terhadap germo, yang menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi dan kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum. Masyarakat yang menilai prostitusi sebagai tindakan yang tidak bermoral dan melanggar tatanan sosial sering kali memperburuk kondisi PSK, sementara hukum yang ada tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi patron-klien antara germo dan PSK dalam konteks sosial dan hukum di Kabupaten Semarang, serta tantangan-tantangan yang dihadapi PSK dalam mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketergantungan PSK terhadap germo, serta untuk menganalisis sejauh mana hukum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi PSK dalam hubungan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis socio-legal, yang memadukan teori hubungan patron-klien dengan perspektif hukum sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan PSK, germo, aparat penegak hukum, serta masyarakat setempat, serta pengamatan langsung terhadap pola interaksi sosial dan hukum yang terjadi di lapangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan fenomena yang ada dengan teori patron-klien serta mengkaji bagaimana sistem hukum di Indonesia mempengaruhi perlindungan PSK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan patron-klien antara germo dan PSK di Kabupaten Semarang menciptakan ketergantungan yang menguntungkan pihak germo, sementara PSK tetap terjebak dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap eksploitasi. Perlindungan hukum bagi PSK masih sangat terbatas, terutama karena prostitusi dianggap ilegal dan tidak ada regulasi yang secara spesifik melindungi hak-hak PSK. Selain itu, stigma sosial dan budaya patriarki yang kuat memperburuk kondisi PSK, sehingga mereka seringkali tidak mendapatkan akses keadilan yang adil. Penelitian ini merekomendasikan reformasi dalam sistem hukum serta pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada hak-hak PSK sebagai korban eksploitasi.

Kata Kunci : Pekerja Seks Komersial, Patron – Client, Perspektif Sosio - Legal

ABSTRACT

Prostitution in Indonesia remains a controversial issue, both legally, socially, and morally. In this context, the relationship between pimps (patrons) and commercial sex workers (CSWs) has a complex dynamic, where the patron-client relationship plays a significant role in the structure of prostitution. In many cases, CSWs are often in a position of economic dependence on pimps, making them vulnerable to exploitation and facing difficulties in accessing legal protection. Society's view of prostitution as immoral and against social norms often worsens the situation for CSWs, while the existing legal framework fails to provide optimal protection.

The research questions in this study focus on how the patron-client relationship between pimps and CSWs is understood within the social and legal contexts in Semarang Regency, and the challenges faced by CSWs in obtaining legal protection. This study also aims to explore the factors influencing the dependency of CSWs on pimps and to analyze how the law can provide justice and protection for CSWs in this relationship.

The research method used is a qualitative approach with socio-legal analysis, combining patron-client theory with a social legal perspective. Data were collected through in-depth interviews with CSWs, pimps, law enforcement officers, and local communities, as well as direct observation of social and legal interactions in the field. The analysis compares the existing phenomena with patron-client theory and examines how Indonesia's legal system influences CSWs' legal protection.

The research findings indicate that the patron-client relationship between pimps and CSWs in Semarang Regency creates dependency that benefits the pimps, while CSWs remain trapped in a weak position and vulnerable to exploitation. Legal protection for CSWs is still very limited, especially since prostitution is considered illegal, and no specific regulations protect the rights of CSWs. Furthermore, the strong social stigma and patriarchal culture exacerbate the situation, preventing CSWs from accessing fair justice. This study recommends reforms in the legal system and the development of more inclusive policies that better protect the rights of CSWs as victims of exploitation.

Keywords : Commercial Sex Workers, Patron – Client, Socio - Legal Perspective